

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa motif terjadinya pembelahan ideologi politik dan implikasi sosial pada Pilkada DKI Jakarta 2017 ini membuat heboh dunia perpolitikan, pasalnya masalah seperti ini baru terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017. Munculnya motif terjadinya pembelahan ideologi saat Pilkada DKI Jakarta ini pun dikarenakan adanya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh salah seorang calon gubernur DKI Jakarta 2017 yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Masalah yang ia timbulkan itu membuat MUI mengeluarkan Fatwanya dan menjadi konflik di masyarakat. Masalah itu juga menimbulkan implikasi sosial di masyarakat Jakarta dan berpengaruh kepada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa di atas, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

Motif penyebab konflik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 ini disebabkan oleh 3 indikator yaitu: **pertama**, indikator komunikasi didalam indikator komunikasi inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya pembelahan ideologi politik dan terjadinya konflik pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pasalnya didalam komunikasi ini salah satu calon gubernur DKI memiliki komunikasi yang buruk saat berpidato di Kepulauan Seribu, yang mana pidatonya itu sendiri telah banyak menyakiti hati umat

Muslim sehingga MUI mengeluarkan Fatwa bahwa Ahok di kategorikan sebagai : (1) *menhina Al – Quran dan atau* (2) *menghina ulama*. **Kedua**, Struktur didalam Struktur ini juga menjadi faktor terjadinya pembelahan ideologi politik, dan konflik pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Karena kelompok – kelompok atau ormas – ormas seperti FPI, MUI, dan (GNPF – MUI) melakukan aksi – aksi 212 yang menyatukan umat Islam untuk menyeret Ahok kepenjara dan mempertanggungjawabkan salahnya dan mereka hanya ingin mendapatkan keadilan. Degan adanya aksi yang dilakukan oleh kelompok – kelompok Islam ini menimbulkan pernyataan dari berbagai macam kalangan yang menimbulkan perpecahan di masyarakat bahkan tokoh – tokoh agama. **Ketiga**, pribadi didalam indikator pribadi ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya pembelahan ideologi politik dan kerusuhan pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Karena Buni Yani yang saat itu menjabat sebagai dosen Swasta telah mengunggah ulang video pidato Ahok di Kepulauan Seribu tanpa mengantongi izin dari pemilik video dan menuliskan judul video tersebut dengan judul “ penistaan terhadap agama” yang membuat masyarakat terpecah belah.

Implikasi sosial ini pun memiliki 5 indikator yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat pada Pilkada DKI Jakarta 2017. **Pertama**, Lingkungan. Adanya pengaruh kampanye berbau agama, dan melakukan sosialisasi secara *door to door* di masyarakat yang akan menjelaskan program kerja setiap calon gubernur dan wakil gubernur. Akan tetapi indikator lingkungan ini tidak terlalu berpengaruh dalam

Pilgub DKI Jakarta 2017. **Kedua**, Perilaku. Indikator perilaku ini juga tidak terlalu berpengaruh terhadap masyarakat dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Seperti perilaku Ahok yang terkesan keras, ceplas – cepelos, dan tegas ini pun juga tidak berpengaruh kepada masyarakat dalam memilih calon gubernur, sama halnya seperti perilaku Anies yang dinilai lemah lembut (kalem) dan tegas ini pun tidak juga berpengaruh kepada masyarakat untuk memilih calon gubernur.

Ketiga, Norma. Indikator norma ini pun juga tidak begitu mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur, akan tetapi malah membuat masyarakat semakin bingung dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur yang terbaik. Pasalnya didalam undang – undang nomor 10 tahun 2016 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mencalonkan diri sebagai pemimpin tanpa ada SARA didalamnya, dan didalam fatwa MUI mengatakan bahwa Ahok adalah seorang penista agama, pemimpin yang telah menistakan agama tidak baik dijadikan pemimpin negara bukan pemimpin daerah. **Keempat**, Teknologi. Media masa dan media Online yang menyebarkan berita hox dan kebencian pun tidak begitu besar dalam mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017, karena sebagian besar masyarakat Jakarta telah cerdas dalam menyaring berita yang kurang akurat. **Kelima**, Keyakinan. Indikator keyakinan ini sangat berdampak terhadap Pilkada DKI Jakarta 2017 dan sangat mempengaruhi masyarakat Jakarta dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017. Karena indikator keyakinan ini melibatkan agama yang sangat kuat

dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dengan adanya pernyataan agama di Pilgub DKI Jakarta 2017 banyak masyarakat yang beralih memilih pemimpin seagama.

Dari kesimpulan keseluruhan di atas motif penyebab terjadinya konflik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 ini ialah indikator komunikasi, indikator komunikasi ini lebih dominan dari pada indikator struktur dan indikator pribadi, karena indikator komunikasi ini yang menyebabkan awal terjadinya pembelahan ideologi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu indikator struktur dan indikator pribadi juga sebagai pendukung terjadinya konflik. Lalu implikasi sosialnya yang paling dominan dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 ialah indikator keyakinan, indikator keyakinan ini lebih dominan dari pada indikator lingkungan, indikator perilaku, indikator norma, indikator teknologi. Karena didalam indikator ini terdapat Statement yang melibatkan agama yang sangat kuat dan dapat menggerakkan masyarakat untuk memilih calon gubernur DKI Jakarta seagama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti akan memberikan saran, permasalahan – permasalahan yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu baik didalamnya mengandung SARA, politik identitas, bahkan terjadi pembelahan ideologi politik dan konflik yang dapat memecah belahkan masyarakat selesai di tahun politik 2017 saja. Untuk Pilkada selanjutnya semoga kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi di tahun politik selanjutnya.

1. Semoga kedepannya para Calon Kandidat lebih selektif lagi dalam berkomunikasi dengan menggunakan kata – kata yang lebih baik, yang tidak menimbulkan perselisihan di masyarakat.
2. Semoga Masyarakat tidak lagi mudah dipropokasi oleh media dan tidak mudah dipengaruhi oleh berita – berita hoax yang tidak kredibel.
3. Terhadap pemerintah untuk kedepannya semoga pemerintah lebih mengayomi masyarakat dan lebih ketat lagi dalam menyeleksi berita – berita hox yang dapat memecah belahkan masyarakat.